

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
OLEH BADAN/ PEJABAT TATA USAHA NEGARA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009**

(Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai

Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama: Hukum Kebijakan Publik



Oleh :

Soeleman Djaiz Baranyanan

NIM : S. 310811012

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user
2013

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH
BADAN/ PEJABAT TATA USAHA NEGARA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009.**

(Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)



DISUSUN OLEH :

SOELEMAN DJAIZ BARANYANAN

NIM : S. 310811012

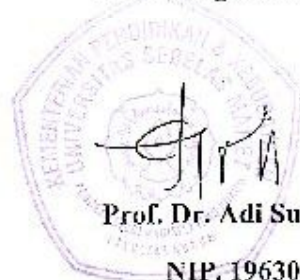
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S. NIP. 195205111980031002		21/6'13
2. Pembimbing II	M. Madalina, S.H., M.Hum. NIP. 19601024198602201		24/6-13

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

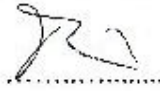
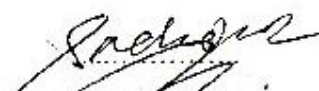


NIP. 196302091988031003

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH
BADAN/ PEJABAT TATA USAHA NEGARA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
(Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)**

Disusun Oleh :

SOELEMEN DJAIZ BARANYANAN
NIM : S.310811012

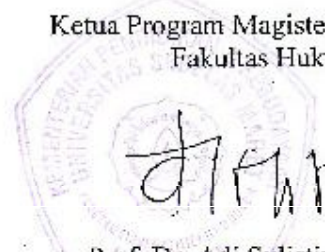

Telah Disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SHI, MLI.</u> NIP. 19630209 198803 1 003		30/7/13
Sekretaris	<u>Dr. Soehartono, SHI., M.Hum.</u> NIP. 19560415 198503 1 002		25/7/13
Anggota Penguji	1. <u>Dr. Djoko Wahyu W. SHI., M.S.</u> NIP. 19520511 198003 1 002		22/7/13
	2. <u>M. Madalina, S.II., M.Hum.</u> NIP. 19601024 19860 2 201		29/7/13

Mengetahui


Direktur Program
Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ahmad Yunus, MS
NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SHI, MH
NIP. 19630209 198803 1 003

PERNYATAAN

Nama : SOELEMEN DJAIZ BARANYANAN

NIM : S. 310811012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH BADAN/ PEJABAT TATA USAHA NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009. (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)”**, adalah benar-benar karya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia untuk di upload atau dipublikasikan di website Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, Juli 2013

Yang membuat pernyataan

Soeleman Djaiz sBaranyanan

commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “ **Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009. (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)** ” ini dapat penulis diselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat magister prograam studi ilmu hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara oleh badan/ pajabat tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan terutama kepada :

1. Prof. Dr. Rafik Karsidi, MS., Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Univeresitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Progrsm Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S., selaku Pembimbing.
6. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum., selaku Co Pembimbing.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dengan penuh ikhlas.
8. Alm. H. M. Djaiz Baranyanan dan Ibu Hj. Saleha Baranyanan selaku orang tua penulis yang telah memberikan dorongan, perhatian, doa dan

kasih sayang dengan setulus hati sehingga saya dapat mencapai kesuksesan dalam meraih gelar magister ini.

9. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan doa diantaranya Mas Yoyok, Mb. Idha, Mas Ali, Mb Ria dan Soleman Lakley.
10. Keponakan-keponakan penulis yang tersayang diantaranya Nabila (Lala), Sabrina (Nana), Dek Alya, dek Aldi, Zoro, Yeyen dan Mala.
11. Para Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah memberikan bantuan moril dalam penyusunan penulisan hukum ini.
12. Saudara-saudaraku Kebijakan Publik Kelas A (Firdanta Sembiring, Solihul Hakiem, Mb Numik, Mas Dian DP, Mas Nugroho, Mas Irphan, Dhana, Bu Susi, Dek Whinda, Bu Yuli, Pak Sumartono, Pak Pardiono, Pak Heru Ismaya, dan Pak Partana), semoga persahabatan ini akan terus terjalin dengan baik.
13. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Batalyon 8 UII yang telah banyak memberikan motivasi bagi penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.

Surakarta, Juli 2013

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum	11
B. Tinjauan Tentang Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	14
C. Tinjauan Tentang <i>Principles Of Legality</i> Lon Fuller	15
D. Pembagian Kekuasaan Kehakiman Dalam Peradilan Tata Usaha Negara	16

commit to user

E. Tinjauan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	29
F. Penelitian Yang Relevan.....	74
G. Kerangka Berfikir	75
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian	83
B. Sifat dan Bentuk Penelitian	84
C. Lokasi Penelitian	85
D. Sumber Data	86
E. Teknik Pengumpulan Data	88
F. Pendekatan Penelitian	88
G. Spesifikasi Penelitian	93
H. Metode Pengumpulan Data.....	93
I. Metode Analisis Data	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	99
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004	101
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	109
D. Transparansi Putusan dan Pelaksanaan Putusan	116
E. Kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	122

commit to user

BAB V	PENUTUP	129
A.	Kesimpulan	129
B.	Implikasi	131
C.	Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 : Dualisme Kekuasaan Kehakiman Dalam Satu Atap	18
B. Tabel 2 : Persyaratan Pengangkatan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	20
C. Tabel 3 : Perubahan Usia Pensiunan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	22
D. Tabel 4 : Skema Sengketa Tata Usaha Negara	28
E. Tabel 5 : Perbedaan Pemeriksaan Upaya Administratif dan Pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara	37
F. Tabel 6 : Perbedaan Pemeriksaan Acara Biasa dan Acara Cepat	57
G. Tabel 7 : Kerangka Berpikir	74
H. Tabel 8 : Perbandingan Peradilan Administratif	88
I. Tabel 9 : Perbandingan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	112

ABSTRAK

Soeleman Djaiz Baranyanan, S. 310811012, **Pelaksanaan Putusan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009**, dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara setelah berlakunya undang-undang nomor 51 tahun 2009 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif untuk menghasilkan data penelitian deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara mengalami banyak sekali problematika dalam penerapan eksekusi peradilan tata usaha negara. Mekanisme pelaksanaan putusan merupakan sarana penting dalam menyelesaikan atau mengakhiri sengketa tata usaha negara. Pada konteks ini perlu dikaji kekuatan eksekutorial putusan pengadilan dan sebab-sebab lain yang mungkin menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan tata usaha negara. Namun terdapat beberapa problem yang menjadi temuan dilapangan yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terutama terhadap mekanisme penerapan sanksi atas Pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara secara sukarela.

Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang kurang begitu efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan mengatur tentang tata cara pelaksanaan mengenai upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif. Yang membuat majelis hakim masih bingung untuk menetapkan besaran uang paksa dan sanksi administratif kepada tergugat. Sehingga pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan memberikan contoh kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Peradilan TataUsaha Negara

commit to user

ABSTRACT

Soeleman Djaiz Baranyanan, S. 310811012, **Execution Decision Judiciary by the State Administrative Board / Administrative After Applicability of the Act No. 51 of 2009, by taking a case study in Semarang State Administrative Court**. Thesis: Graduate University Of Sebelas Maret Surakarta.

This study aims to determine the mechanism of the implementation of the decision of administrative courts after the enactment of Law No. 51 of 2009 if it is in accordance with the laws in force in Indonesia at the moment.

This research includes a normative law study, because the law in this study conceptualized as positive norms in the legal systems of national law. The type of data in this study are secondary data, engineering data collection done by collecting (documentation) secondary data from primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. Data analysis techniques using qualitative analysis methods to generate descriptive research data.

Based on this study result that the enforcement of a state administrative courts experienced a lot of problems in the implementation of the execution of administrative courts. Enforcement mechanism is an important tool in resolving administrative disputes or end . This context need to be assessed and the court eksekutorial force other causes that may be the cause of success and failure in the implementation of judicial decisions in the completion of administrative disputes in the courts state administration. However there are some problems to be finding a field related to the execution of the decision of administrative courts that have permanent legal force, especially the mechanism of the implementation of sanctions against administrative officials who do not perform administrative court voluntarily.

The implication of this research is the implementation of the decision of the administrative courts are less effective in some practice due to the lack of legislation regulating the procedure of forceful measures and sanctions in the form of money forced administrative. That makes the judges are still confused to determine the amount of money forced and administrative sanctions on the defendant. So the enforcement of the State Administrative Court is not able to provide legal certainty for those seeking justice and providing a good example of legal awareness for Indonesian society.

Keywords: Implementation of Decision, The Judiciary of Administration of the State.